

Judul : Wacana konversi kompor gas ke kompor listrik tuai protes
Tanggal : Selasa, 27 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Wacana Konversi Kompor Gas Ke Kompor Listrik Tuai Protes

Wacana konversi kompor gas ke kompor listrik, menuai kontroversi. Ada yang mendukung, banyak yang menolak.

Presiden Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, salah satu yang menolak wacana tersebut.

Menurutnya, wacana mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram (kg) dengan menggantinya ke kompor listrik, sangat membebani masyarakat.

"Jangan terus membebani rakyat. Saat ini, rakyat dipaksa membeli BBM (bahan bakar minyak) dengan harga tinggi. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke

kompor listrik?" kata Mirah Sumirat.

Ia mengingatkan Pemerintah dan DPR, bahwa berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat, juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.

Pemerintah, sarannya, jangan mengurangi pasokan gas LPG tiga kilogram untuk kemudian menggantinya dengan kompor listrik. "Penggunaan kompor listrik, sama saja memaksa masyarakat menaikkan daya listrik menjadi 900 VA," tandasnya.

Karena, lanjutnya, daya listrik 450 VA yang banyak digunakan

rakyat kecil, tidak akan kuat jika dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. Apalagi, masih banyak daerah yang kondisi listriknya memprihatinkan karena sering mati. "Biar rakyat memutuskan sendiri penggunaan listrik sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing," ucap Mirah.

ASPEK Indonesia, kata dia, menuntut Pemerintah agar tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram ke kompor listrik.

Bagaimana para wakil rakyat memandang keberatan rakyat seperti itu? Berikut wawancara dengan anggota Komisi VI DPR dari PPP, Achmad Baidowi, dan anggota Komisi VII DPR dari Golkar, Mukhtarudin mengenai hal ini.

MUKHTARUDIN
Anggota Komisi VII DPR

Bagaimana Jika Nanti Listrik Mati



Bagaimana jika saat masak, mati lampu, lalu gas tidak ada. Akhirnya, pakai kayu bakar lagi.



Apakah Anda setuju konversi kompor gas ke listrik?

Kita lihat hasil uji cobanya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tetapi, secara pribadi, saya melihat bahwa kurang cocok dari kompor gas ke kompor listrik.

Kenapa?

Karena, kompleksitas penerapannya. Banyak masalah, dalam konteks infrastruktur pendukung maupun perilaku masyarakat kita.

Maksud Anda?

Banyak jenis makanan yang tidak bisa dimasak dengan kompor listrik.

Kita tahu, makanan Indonesia berbeda dengan makanan orang bule. Artinya, perilaku masak juga berbeda.

Belum lagi, para pedagang kecil yang jualan keliling pakai gerobak, misalnya tukang nasi goreng harus berhenti pakai gas, itu bagaimana sumber listrik untuk kompornya. Itu kan repot.

Ada lagi?

Belum lagi soal jaminan pasokan listriknya yang kurang memadai. Bagaimana jika tiba-tiba listrik mati karena gangguan jaringan. Apakah PLN bisa menjamin itu tidak terjadi. Ini yang menjadi pertanyaan besar.

Bagaimana jika saat masak, mati lampu, lalu gas tidak ada. Akhirnya, pakai kayu bakar lagi. Kalau kayu tidak ada, berarti tidak masak dan tidak makan. Kompleks persoalannya.

Susah diterapkan ya?

Saya secara lisan sudah menyampaikan kepada Pemerintah, program ini kayaknya sulit diterapkan karena persoalannya sangat kompleks.

Lalu, bagaimana mengenai over supply listrik?

Perlu dihitung oleh PLN dan Pemerintah, over supply ini sampai tahun berapa. ■ **REN**

ACHMAD BAIDOWI
Anggota Komisi VI DPR

Jangan Sampai Cuma Pindahin Subsidi Aja



Harus dihitung secara cermat, jangan sampai nanti subsidi justru pindah ke listrik. Hanya beda tempat.

Bagaimana pendapat Anda mengenai wacana kompor gas diganti kompor listrik?

Idenya itu bagus. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Apa keunggulan kompor listrik?

Kompor listrik itu mengurangi polusi udara karena menggunakan blue energi.

Apa lagi?

Kompor listrik menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan

penggunaan energi fosil.

Namun demikian, harus dipastikan bahwa infrastrukturnya terjangkau. Artinya, peralatannya harus murah, pasokan listrik yang memadai serta harga daya listriknya terjangkau masyarakat.

Apakah anggaran subsidi akan berkurang jika masyarakat beralih ke kompor listrik?

Harus dihitung secara cermat, jangan sampai nanti subsidi justru pindah ke listrik. Hanya beda tempat.

Apa harapan Anda?

Sebelum program ini dilaksanakan,

harus ada cetak biru mengenai rencana ini. Jadi, harus benar-benar dilakukan secara maksimal, masif. Jangan hanya kebijakan, tapi tanpa ada rencana yang lebih memadai.

Apa akibatnya jika dipaksakan?

Jangan sampai masyarakat memasang kompor listrik, ternyata mahal karena daya setrumnya tinggi sekali.

Infrastrukturnya diberesi dulu ya?

Iya, jangan sampai mahal. Seandainya harga murah, infrastrukturnya bagus, rakyat akan mendukung. ■ REN